

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan interaksi masyarakat modern khususnya dalam bidang ekonomi tercermin dalam perputaran uang yang merupakan bagian sangat vital dalam kehidupan manusia. Lalu lintas barang dan jasa menggunakan uang sebagai alat tukar dimana uang dijadikan aset untuk melakukan transaksi. Mankiw (2006) berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) fungsi utama keberadaan dan fungsi dari uang, yaitu media pertukaran (*medium of exchange*), penyimpan nilai (*store of value*) dan satuan hitung (*unit of account*).

Uang yang digunakan masyarakat sekarang ini merupakan evolusi dari pembayaran melalui barter, dilanjutkan menggunakan emas hingga dalam bentuk kertas dan logam yang biasa juga disebut uang kartal. Keberadaan uang kartal memberikan alternatif efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi. Efisiensi dan kemudahan penggunaan uang dapat meningkatkan perdagangan karena diterima oleh seluruh lapisan masyarakat umum sebagai alat

pembayaran dan alat tukar (Abdullah dan Tantri, 2012).

Menurut UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagai mata uang yang terdiri dari uang rupiah kertas dan uang rupiah logam. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengelola uang rupiah mulai dari tahapan pengeluaran, pagedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah. Sedangkan tahapan perencanaan, pencetakan dan pemusnahan uang, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah (Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah). Bank Indonesia bertugas memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan kondisi layak edar.

Ketersediaan uang kartal di masyarakat tidak terlepas dari pergerakan uang yang dapat dilihat dari konsep perputaran uang (*velocity of money*). Perputaran uang merupakan rata-rata perputaran satu unit mata uang digunakan untuk membeli total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian

(Miskhin,2017). Hal ini menunjukkan bahwa secara nasional Produk Domestik

Bruto (PDB) dalam perekonomian berpengaruh terhadap perputaran uang. Keynes (dalam Nopirin 2012) menyatakan bahwa permintaan uang untuk transaksi tergantung dari pendapatan. Makin tinggi pendapatan, makin besar keinginan seseorang bertransaksi menggunakan uang. Secara regional, pendapatan tersebut terwakili dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan perputaran uang dapat dilihat arus keluar (*outflow*) dan arus masuk (*inflow*) uang di Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah.

Perputaran uang kartal di Kota Ternate didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang positif. Berdasarkan data BPS 2021, Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Kota Ternate selama 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) tumbuh positif dengan laju rata-rata 7,8% per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang positif mendorong tingkat konsumsi masyarakat menggunakan uang kartal untuk bertransaksi. Hal ini selaras dengan rata-rata pertumbuhan arus uang keluar (*outflow*) sebesar 2,9% per tahun (data Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara).

Karakteristik perputaran uang di Kota Ternate adalah *net outflow*, dimana aliran uang keluar (*outflow*) dari Bank Indonesia Maluku Utara di khazanah Ternate kepada masyarakat melalui perbankan lebih besar dibandingkan aliran uang masuk (*inflow*) dari masyarakat ke Bank Indonesia melalui perbankan. Periode tahun 2020 *inflow* tercatat Rp.1.685 miliar, dengan rata-rata kenaikan selama lima tahun terakhir sebesar 11,3 % tahun. Adapun *outflow* tercatat Rp.2.623 miliar, dengan rata-rata kenaikan selama lima tahun terakhir sebesar 2,9% per tahun. Sehingga aliran uang kartal (*cashflow*) menghasilkan *net outflow* sebesar Rp. 1.173 miliar. Namun di tahun 2020, baik *inflow* maupun *outflow* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berpengaruh terhadap penurunan *net outflow* sebesar 6%. Hal ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi, tercermin dalam penurunan PDRB.

Kebutuhan uang kartal yang tinggi di masyarakat pada praktiknya tidak seimbang antara perputaran sirkulasi uang rupiah kertas dan uang rupiah logam sebagai alat transaksi pembayaran di Kota Ternate. Terdapat kecenderungan masyarakat enggan menggunakan uang rupiah logam dalam bertransaksi. Hal ini menimbulkan praktik *hoarding* atau penimbunan uang di masyarakat tanpa melakukan sirkulasi kembali.

Data sirkulasi uang rupiah kertas tahun 2020 *outflow* tercatat Rp.2.621 miliar dengan *inflow* sebesar Rp.1.685 miliar, sehingga terdapat *hoarding* di masyarakat sebesar Rp.936

miliar atau 36% dari *outflow*. Rata-rata *hoarding* periode tahun 2016-2020 adalah 38% dari arus uang keluar Bank Indonesia. Hal ini masih terbilang normal dengan fakta di lapangan bahwa uang rupiah kertas masih digunakan masyarakat untuk bertransaksi.

Namun tidak demikian dengan uang rupiah logam, data menunjukkan *outflow* uang rupiah logam tahun 2020 sebesar Rp.1.510 juta. Sedangkan *inflow* hanya Rp.30 juta atau 2% dari uang yang keluar di Bank Indonesia, sehingga terdapat *hoarding* sebesar 98% uang logam di masyarakat atau rata-rata 88% per tahun selama 5 (lima) tahun terakhir. Uang rupiah logam tersebut pada praktiknya tidak digunakan untuk bertransaksi, berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat bahwa terjadi penolakan apabila menggunakan uang rupiah logam untuk pembayaran sehingga ketika mendapatkan uang rupiah logam masyarakat cenderung tidak menggunakan kembali untuk bertransaksi.

Tabel 1. Transaksi, Persepsi dan Motivasi Penggunaan Uang Rupiah Logam

No	Keterangan	Pedagang/ Swasta	Ibu Rumah Tangga	PNS/ Pegawai	Pelajar/ Mahasiswa	Persentase
<b>Transaksi Uang Logam :</b>						
1	Penolakan Pembayaran	4	2	2	1	90%
	Penerimaan Pembayaran	-	-	-	1	10%
2	Penolakan Pengembalian	-	-	-	2	20%
	Penerimaan Pengembalian	4	2	2	-	80%
3	Menggunakan transaksi selanjutnya	-	2	-	1	30%
	Tidak menggunakan transaksi selanjutnya	-	-	2	1	70%

<b>Persepsi dan Motivasi Penggunaan Uang</b>					
<b>Logam :</b>					
Sulit disimpan/dibawa	1	1	-	1	20%
Tahan lama	-	-	-	2	20%
4 Kurang bergengsi Tidak berlaku	3	-	1	-	40%
Nominal tidak sesuai harga barang	-	-	1	-	10%

Guna mengetahui fenomena *hoarding* di Kota Ternate, Kantor Perwakilan

Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku Utara telah melakukan penggalan informasi awal terhadap 10 (sepuluh) orang masyarakat yang melakukan penukaran uang di loket penukaran secara acak. Informasi diperoleh melalui

4 (empat) pertanyaan terkait pengalaman bertransaksi uang rupiah logam serta persepsi dan motivasi masyarakat dalam penggunaan uang rupiah logam. Hasilnya sebanyak 90% pernah menerima penolakan pada saat transaksi pembayaran menggunakan uang rupiah logam. Walaupun ditolak pada saat pembayaran, 80% menerima uang rupiah logam pengembalian pada saat transaksi. Sedangkan untuk transaksi selanjutnya, sebanyak 70% mengaku tidak akan menggunakan uang rupiah logam. Klaim untuk tidak akan menggunakan uang rupiah logam sangat dimungkinkan terjadi karena pengalaman transaksi penolakan sebelumnya, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.

Terkait persepsi dan motivasi masyarakat menggunakan uang rupiah logam, sebanyak 40% menganggap uang rupiah logam sudah tidak berlaku lagi. Hal ini diketahui pada saat mengalami penolakan pembayaran, dimana disampaikan oleh penjual bahwa uang logam sudah tidak berlaku lagi. Informasi tersebut menjadi stimulus untuk membentuk persepsi sebagaimana pendapat Kotler (2007) bahwa persepsi merupakan proses individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan stimulus informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Sehingga pengalaman ditolak pada saat pembayaran,

memungkinkan masyarakat untuk tidak menggunakan lagi uang rupiah logam untuk transaksi selanjutnya.

Selain itu, masyarakat beranggapan bahwa menggunakan uang rupiah logam kurang bergengsi (20%), sulit dibawa atau disimpan (20%) namun diakui fisik uang rupiah logam kuat dan tahan lama (10%). Pendapat masyarakat uang rupiah logam kurang bergengsi, sulit dibawa dan disimpan diduga merupakan alasan motivasi secara emosional dan rasional enggan digunakan untuk transaksi. Kesimpulan tersebut dikuatkan pendapat Sigit (2002) bahwa motivasi pembelian atau penggunaan produk, dalam konteks uang rupiah logam, didorong oleh 2 (dua) hal yaitu faktor rasional berdasarkan penerimaan dan kualitas produk; dan faktor emosional berdasarkan perasaan dan kesenangan akan produk yang dapat meningkatkan status sosial dimana penilaiannya bersifat subyektif, contohnya bertransaksi dengan rupiah logam akan dipandang suatu hal yang bergengsi.

Adapun persepsi yang menyatakan nominal uang rupiah logam sudah tidak sesuai dengan harga terkecil barang (10%), dapat memicu terjadinya lonjakan harga yang berpotensi inflasi akibat penolakan uang rupiah logam karena nominal lebih kecil digantikan uang kertas nominal lebih besar mengakibatkan harga lebih mahal.

Menurut Nicholson (2002), preferensi terbentuk dari pengalaman positif yang memiliki 3 (tiga) asumsi terhadap kualitas produknya yaitu kelengkapannya (*completeness*), bersifat transitif (*transivity of reference*) dan kontinuitas (*continuitas*). Preferensi masyarakat untuk menggunakan uang rupiah logam apabila dilihat dari hasil survey, berkaitan erat dengan pengalaman dari transaksi sebelumnya serta dipengaruhi oleh persepsi dan motivasi yang memiliki asumsi kelengkapan; bersifat transitif; dan kontinuitas dari uang rupiah logam sebagai suatu produk. Namun demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan terperinci,

sejauh mana pengaruh persepsi dan motivasi terhadap preferensi penggunaan uang rupiah logam.

Terlepas dari persepsi dan motivasi masyarakat dalam penggunaan uang rupiah logam, fenomena penolakan uang rupiah logam merupakan hal sangat serius karena berdampak konsekuensi hukum apabila menolak sebagai alat pembayaran yang sah. Merujuk UU Mata Uang No 7 tahun 2011 pasal 23 menegaskan dilarang untuk menolak rupiah untuk transaksi pembayaran, apabila terjadi pelanggaran dapat dipidana kurungan 1 (satu) tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Penolakan uang rupiah logam yang terjadi di Kota Ternate selama ini belum tersentuh hukum, walaupun telah ada produk hukum yang melarangnya. Perlu adanya ketegasan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk melakukan tindakan kepada masyarakat yang menolak transaksi menggunakan uang rupiah logam. Masyarakat yang ditolak uang rupiah logamnya akhirnya hanya menyimpan tidak melakukan sirkulasi kembali sehingga membuat *hoarding* meningkat, sedangkan masyarakat yang menolak berdalih khawatir tidak dapat menggunakan uang rupiah logam tersebut untuk transaksi selanjutnya.

Berdasarkan uraian latar belakang teoritis dan empiris di atas, perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait fenomena *hoarding* dan keengganan menggunakan uang rupiah logam dengan menindaklanjuti penelitian sebelumnya. Kajian tersebut akan dilakukan penulis dalam bentuk penelitian yang menganalisis pengaruh persepsi dan motivasi terhadap preferensi penggunaan uang rupiah logam oleh masyarakat di kota Ternate.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi berpengaruh terhadap preferensi penggunaan uang rupiah logam?

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap preferensi penggunaan uang rupiah logam?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi terhadap preferensi penggunaan uang rupiah logam.
2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap preferensi penggunaan uang rupiah logam.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini fokus terhadap preferensi penggunaan uang rupiah logam di masyarakat dengan pertimbangan persepsi dan motivasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menemukan jawaban pengaruh persepsi dan motivasi terhadap preferensi penggunaan uang rupiah logam. Hal ini dapat dijadikan solusi permasalahan *hoarding* dan penolakan uang rupiah logam serta menjadi acuan dalam penyusunan Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) di KPw BI Provinsi Maluku Utara terkait dengan distribusi uang rupiah logam khususnya di kota Ternate.

#### 2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber referensi dan dasar acuan bagi pengembangan penelitian berikutnya serta memperkaya kajian teoritik dalam bidang manajemen keuangan dan pemasaran khususnya terkait preferensi produk yang dalam hal ini adalah uang rupiah logam.



